

PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)

Nazaruddin¹ dan Syahril²

¹Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

²Program Studi Akuntansi
Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan membagi kuesioner kepada 85 pegawai yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS versi 19. Hasil penelitian, koefisien korelasi (R) sebesar 0,551 (55,1%) artinya peran audit internal mempunyai hubungan yang kuat dengan Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,304 (30,4%) artinya peran audit internal memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 30,4%. Sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) mengenai pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diperoleh diperoleh thitung sebesar 6.019 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan diketahui ttabel sebesar 1,663. Dengan demikian thitung > ttabel, artinya peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Peran audit internal, kualitas laporan keuangan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah Kualitas (Arfianti, 2011).

Kualitas merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatan waktu merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par.35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dilihat dari pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2015, secara umum masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam indikatornya menunjukkan efektivitas masih dibawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan Kota Lhokseumawe yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target. Selain itu terdapat kelemahan pada bagian bendaharawan di setiap SKPD yang belum melakukan pengamanan dan pengendalian secara maksimal, kemudian bagian keuangan setiap SKPD belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan dengan baik. Jika ditinjau dari sistem pengendalian *intern*, mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan APBD Kota Lhokseumawe yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang belum diterapkan secara maksimal di bagian keuangan pada masing-masing SKPD. Kondisi SKPD Kota Lhokseumawe tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Kondisi SKPD Kota Lhokseumawe tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya

pengendalian *intern* akuntansi yang lemah akan mengakibatkan kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi.

Menurut Hadari Nawawi (2002: 137) pengawasan *intern* adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing. Pengendalian *intern* di lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor privat. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pada pasal 17 menyatakan: ayat (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; ayat (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan; ayat (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana

Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Menurut SE/14/M.PAN/10/2006 dalam memiliki delapan unsur melaksanakan pengawasan tersebut meliputi: pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan *review intern*. Unsur-unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan terhadap bawahannya.

Menurut Santoyo Gondodiyoto (2009:160), unsur-unsur sistem pengendalian *intern* sangat penting karena sistem mempunyai beberapa unsur dan sifat-sifat tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Setiap unsur mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pengendalian *intern* serta langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhinya.

Unsur paling penting dari sistem pengawasan *intern* terletak pada para pelaksanaannya, yaitu karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Orang-orang yang jujur dan bekerja secara efisien selalu mampu untuk bekerja dengan segala kesungguhan, meskipun hanya didukung oleh sedikit unsur pengendalian lainnya, dan meskipun kelima unsur pengendalian lain tersebut begitu kuat, akan tetapi orang-orang yang tidak berkompeten dan tidak jujur akan dengan mudah membuat sistem menjadi berantakan.

Pengawasan atau pengendalian akuntansi menurut Zaki Baridwan (2000:47) adalah pengendalian akuntansi yang terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan finansial, dan konsekuensinya, organisasi, prosedur, dan catatan-catatan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti:

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus.
2. Transaksi-transaksi dicatat untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva.
3. *Acces* (penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan otorisasi manajemen.
4. Tanggung jawab akan aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan

2. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian *intern* Pemerintah bahwa SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah

menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
 - g. sumber daya manusia.
 - h. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - i. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko.
 - a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
 - b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (1) Identifikasi risiko; dan (2) Analisis risiko.
 - c. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan: (1) Tujuan instansi pemerintah, dan (2) Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Undang-undang.

3. Kegiatan pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah

wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara Tertulis.
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

3. Perencanaan dan Pengawasan

Pada dasarnya perencanaan dan pengawasan *intern* terdiri dari lima tahapan aktivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran

Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarahkan pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar dan sasaran berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan operasional) (Abdul Halim, 2007:30).

2. Perencanaan Operasional

Tahapan ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Perencanaan operasional pada umumnya merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat alternative program dan kegiatan yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional dirumuskan dalam jangka pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran datuan uang pada tahap penganggaran (Abdul Halim, 2007:30)

3. Penganggaran

Proses penyusunan anggaran merupakan aktivitas yang memiliki arti dan peranan penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktifitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber daya ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Abdul Halim, 2007:31).

4. Pengendalian dan Pengukuran

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu organisasi yang menunjukkan hubungan input dan output. Input dalam anggaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukkan batas maksimum jumlah uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal secara rasional dapat dicapai (Abdul Halim, 2007:31).

Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Dalam konteks pengeluaran daerah, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah: (a) Jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan; dan (b) Tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai. Pengukuran adalah aktivitas pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan anggaran dalam aktivitas pengendalian.

5. Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik

Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan beserta realisasinya, dan selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang terealisasi. Selisih tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya. Hasil analisis sebagai dasar untuk memberikan alternatif umpan balik untuk tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian

meliputi revisi perencanaan operasional, revisi anggaran dan/ atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran (Abdul Halim, 2007:31).

Anggaran sendiri mempunyai beberapa fungsi penting. Antony dan Govindarajan (2003) serta Morse, Davis dan Hartgraves (2003) yang dikutip oleh Abdul Halim (2007:166) menyebutkan fungsi anggaran sebagai:

- a. Penyelarasan terhadap rencana strategi
- b. Alat koordinasi
- c. Pembagian tanggung jawab
- d. Dasar evaluasi kinerja

6. Susunan dan Komponen Anggaran

Anggaran (*master budget*) dapat dibagi menjadi 2 komponen (Horngren, Sundern and Stratton, 2002), yaitu anggaran operasi (*Operating Budget*) dan anggaran keuangan (*Financial Budget*). Anggaran operasi fokus pada laporan laba rugi dan pendukungnya, oleh karenanya disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan target-target pendapatan dan perkiraan biaya-biaya dalam periode mendatang. Sedangkan anggaran keuangan lebih berfokus pada dampak anggaran operasi terhadap kas, sehingga susunannya menunjukkan anggaran kas (kas masuk dan kas keluar), anggaran modal (*Capital Budget*) dan perkiraan neraca (*budget balance sheet*) (Abdul Halim, 2007:166).

- a. Anggaran Daerah; Arti penting anggaran daerah dapat dilihat

dari aspek-aspek berikut ini:

(1) Anggaran merupakan alat bagi pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*Scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

- b. Struktur Anggaran Daerah;
 - 1) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang terdiri dari (a) pendapatan asli daerah; (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - 2) Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah seperti; (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Modal; (d) Bunga; (e) Subsidi; (f) Hibah; (g) Bantuan sosial; (h) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan (i) Belanja Tidak Terduga.

- 3) Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, seperti penerimaan dan pengeluaran.

C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memberikan respons sesuai dengan permintaan penulis. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Adapun angket yang dibagikan kepada responden berisi butir pertanyaan mengenai variabel peran audit internal (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai pengaruh peran audit internal (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui regresi linear sederhana.

Regresi linier sederhana adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (*variabel dependen*) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (*variabel independen*). Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Menurut Sugiyono (2007:277) Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Bentuk formula regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y : Kualitas laporan keuangan
a : Konstanta
X : Peran audit internal
B : Koefesien Regresi
e : *Error Term*

D. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Suatu koesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk nilai kritis dalam penelitian ini adalah 0,3. Adapun hasil uji validitas untuk variabel Peran Audit Internal (X) seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Uji validitas Mengenai Peran Audit Internal (X)

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,471	0,3	Valid
2	2	0,600	0,3	Valid
3	3	0,552	0,3	Valid
4	4	0,654	0,3	Valid
5	5	0,795	0,3	Valid
6	6	0,597	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.1 di atas, dari 6 kuesioner mengenai Peran Audit Internal (X_1) yang dibagikan kepada responden pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, semua butir pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} >$ nilai kritis.

Tabel 4.2 di atas, dari 6 kuesioner untuk variabel Kualitas laporan keuangan (Y) yang dibagikan kepada responden pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, semua butir pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} >$ nilai kritis.

2) Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 19. Adapun hasil uji reliabilitas untuk variabel X dan variabel Y seperti terlihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Responden	Butir Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha
1.	Peran Audit Internal (X)	85	6	0,656	0,60
2.	Kualitas laporan keuangan (Y)	85	6	0,659	0,60

Sumber : Data diolah, 2016

Hasil uji validitas mengenai kualitas laporan keuangan (Y) seperti terlihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Uji validitas Mengenai Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,600	0,3	Valid
2	2	0,736	0,3	Valid
3	3	0,475	0,3	Valid
4	4	0,803	0,3	Valid
5	5	0,397	0,3	Valid
6	6	0,474	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, tingkat reliabilitas dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu: untuk variabel peran audit internal (X) sebesar $0,656 > 0,60$, dan variabel kualitas laporan keuangan (Y) yaitu sebesar $0,659 > 0,60$. Dengan demikian hasil uji reliabilitas untuk semua variabel adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas diuji dengan statistik non

parametrik yaitu uji *Kolmogorof Smirnov* (K-S), dengan kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada besaran nilai *Kolmogorof Smirnov* (K-S) Z dan *Asymp Sig* (2-tailed), variabel dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada signifikansi 95%.

Hasil uji normalitas mengenai peran audit internal (X), dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

bahwa probabilitas (sig) dari nilai Peran audit internal (X) yaitu $0,063 > 0,05$, dan Kualitas laporan keuangan (Y) yaitu $0,365 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan semua variabel yang diuji terbukti berdistribusi normal.

3. Analisis Data

Teknik analisis data mengenai pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dirumuskan dalam fungsi regresi

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data

No	Nama Variabel	Asym. Sig (p-value)	Kondisi	Keterangan Distribusi Data
1.	Peran Audit Internal (X)	0,063	$P > 0,05$	Normal
2.	Kualitas laporan keuangan (Y)	0,365	$P > 0,05$	Normal

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, hasil pengujian normalitas menunjukkan linear sederhana. Hasil uji regresi linear sederhana seperti Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Uji Regresi Linear sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t _{tabel}	t _{hitung}	Sig.	
	B	Std. Error				
1	Constant	1.606	0,440	1,663	3.650	0,000
	Peran Audit Internal (X)	0,621	0,103	1,663	6.019	0,000
	R	= 0,551	= 55,1%	F _{hitung}	= 36.228	
	R Square	= 0,304	= 30,4%	F _{tabel}	= 3,953	
	Adjusted R Square	= 0,295	= 29,5%	Sig F	= 0,000	

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka diketahui persamaan regresi linear sederhanayaitu sebagai berikut:

$$Y = 1,606 + 0,621X + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstan sebesar 1,606 artinya jika peran audit internal dianggap konstan, maka nilai Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 1,606%
2. Koefisien peran audit internal (X) sebesar 0,621, artinya jika nilai peran audit internal meningkat 1%, maka nilai Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 0,621.

4. Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel *dependen* dengan variabel *independen*.

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien korelasi (R) sebesar 0,551 (55,1%) artinya peran audit internal mempunyai hubungan yang kuat dengan Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,304 (30,4%) artinya peran audit internal memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

sebesar 30,4%. Sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan (uji F) dan dan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi sederhana.

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) mengenai pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- 1) Variabel peran audit internal (X) diperoleh t_{hitung} sebesar 6.019 dengan tingkat

signifikan sebesar 0,000 dan diketahui t_{tabel} sebesar 1,663. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa: Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

Darwanis. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern akuntansi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol.2 No. 2 Juli 2009.

Desi dan Ertambang. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi vol. 2.

Desmiyawati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

Keuangan (Studi empiris pada SKPD Pemda Riau). Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik,(2006). SAP Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005. Yogyakarta : BPFE.

Ghozali, Imam. (2005).Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Semarang: Universitas Diponegoro.

Hendriksen Eldon S, Michael F. Van Breda.(2000).Teori Akuntansi Buku Satu, Edisi kelima.Alih Bahasa Herman Wibowo. Jakarta: Interaksa.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Standard Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Irham, Fahmi.(2012).Analisis Laporan Keuangan,Bandung:Alfabeta.

Kasmir,(2011).Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Lantip, Prasajo dan Diat, Riyanto. (2011). Teknologi Informasi Pendidikan. Yogyakarta:Grava Media

Mardiasmo. (2002).Akuntansi Sektor Publik EdisiPertama. Yogyakarta: Andi.

- Matutina.(2001).Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kedua. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Mcgee, R.W.(2007).*Timeliness of Financial Reporting in The Russian EnergySectors*, <http://ssrn.com/abstract>, diakses, 27September 2014
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada.
- Mulyanto, Agus.(2009). Sistem informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawir, Slamet. (2002).Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari. (2010).Metode penelitian bidang social. Yogyakarta: Gajah Mada, University press.
- Nasir, Azwir dan Oktari, Ranti. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian *Intern* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. <http://download.portalgaruda.org/article>. di akses 13 Mei 2015.
- Nordiawan, Deddi.(2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- PeraturanPemerintahRepublikIndonesia No. 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansiPemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Primayana, Kadek Hengki, dkk. (2014). Pengaruh Kapasias Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daearah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). Jurnal. Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.
- Rohman, Abdul. (2009).Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ruky,Ahmad. S. (2003).SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- Samsudin, Sadili. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Santika. (2003). Sistem informasi akuntansi. Edisi pertama. Yogyakarta: Ardana Media.
- Santoso, Singgih. (2002). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saydam, Gouzali. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia: Suatu pendekatan Mikro. Jakarta: Djambaran.
- Sedarmayanti. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2000). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja. Bandung: Ilham Jaya.
- Sundjaja, S., Ridwan, dan Barlian, Inge. (2002), Manajemen Keuangan Satu, Edisi Keempat, Jakarta, Prenhallindo.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, M. (2005). Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Usman, Husaini. (2008). Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahana Komputer. (2006). Pengolahan Database dengan MySQL. Yogyakarta: Andi dan Semarang: Wahana Komputer.
- Wahyono, Teguh. (2004). Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer. Yogyakarta: Andi.
- Wahyudi, Bambang (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita.
- Warisno. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Longkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Thesis: Sekolah Pascasarjana USU.
- Widjajanto, Nugroho. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Erlangga.
- Widuri, Retnaningtyas. (2010). Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderator Terhadap Hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepuasan Pengguna pada End User Computing, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 12, No.1 Hal. 41-52.
- Wilkinson, Josep W. (2000). *Accounting Information System Essential Concept and Application*, 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA
- Yani, Ahmad. (2012). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yudianta, I Gede Agus dan Erawati, Nimade Adi. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal: Akutansi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.